

KEMISKINAN STRUKTURAL NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI POLITIK PAULUS: KAJIAN ANALITIS TERHADAP ROMA 13

Apriliatus Laiskodat¹, Yerniaman Laia²

^{1,2} Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang

Email: aprilaiskodat@gmail.com, HP: 082147638320

Abstract

*This study aims to analyze structural poverty in East Nusa Tenggara through the framework of Paul's political theology, with a particular focus on Romans 13:1–7. Employing an interdisciplinary qualitative-library approach that integrates grammatical-historical hermeneutics, contextual hermeneutics, liberation hermeneutics, and socio-structural analysis, the study reveals three major findings. First, poverty in East Nusa Tenggara is the product of four structural roots: the legacy of colonialism, fiscal inequality, geographical marginalization, and a patron-client political culture. Second, the grammatical analysis of the terms *exousia*, *hupotassō*, *diakonos*, and *leitourgos* demonstrates that Romans 13 functions as a normative-evaluative standard for political authority rather than a theological legitimation of absolute power. Third, the implications for the churches in East Nusa Tenggara involve a prophetic-transformative role through policy advocacy and alternative economic practices grounded in *koinonia*. The contribution of this study lies in constructing the first systematic synthesis that brings together Pauline hermeneutics and the structural analysis of poverty in East Nusa Tenggara within a coherent framework of public theology.*

Keywords: Structural Poverty; Political Theology; Contextual Hermeneutics; Prophetic Role

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemiskinan struktural di Nusa Tenggara Timur melalui kerangka teologi politik Paulus dengan fokus pada Roma 13:1–7. Menggunakan pendekatan kualitatif-kepuustakaan interdisipliner yang memadukan hermeneutika gramatikal-historis, hermeneutika kontekstual, hermeneutika pembebasan, dan analisis sosial-struktural, penelitian ini menemukan tiga hal: pertama, kemiskinan NTT merupakan produk empat akar struktural warisan kolonialisme, ketimpangan fiskal, marginalisasi geografis, dan budaya politik patron-klien; kedua, analisis gramatikal terhadap *exousia*, *hupotassō*, *diakonos*, dan *leitourgos* menunjukkan bahwa Roma 13 berfungsi sebagai standar normatif evaluatif terhadap kekuasaan, bukan legitimasi teologis kekuasaan absolut; ketiga, implikasinya bagi gereja NTT adalah peran profetis-transformatif melalui advokasi kebijakan dan ekonomi alternatif berbasis *koinonia*. Kontribusi penelitian ini adalah membangun sintesis pertama yang secara sistematis mempertemukan hermeneutika Paulus dan analisis struktural kemiskinan NTT dalam kerangka teologi publik yang koheren.

Kata Kunci: Kemiskinan Struktural; Teologi Politik; Hermeneutika Kontekstual; Peran Profetis



PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu persoalan sosial-politik paling persisten di Indonesia yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan NTT mencapai 19,96%, hampir dua kali lipat rata-rata nasional, disertai prevalensi stunting 35,3% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,04, jauh di bawah angka nasional. Dalam perspektif kapabilitas, kondisi ini menandakan bahwa masyarakat NTT mengalami deprivasi mendasar dalam mengembangkan potensi hidup yang layak (Sen, 1999).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa akar persoalan tersebut bersifat struktural dan historis. Warisan kolonialisme menempatkan NTT sebagai wilayah periferi dalam sistem ekonomi nasional (Wallerstein, 1974), sementara ketimpangan fiskal, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik antarpulau, dan budaya politik patron-klien terus mereproduksi kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada elite lokal (Brodjonegoro, 2004; Scott, 1972). Dalam kerangka structural violence, kemiskinan dipahami sebagai akibat dari relasi kuasa yang timpang dan distribusi sumber daya yang tidak adil (Galtung, 1969).

Dalam konteks NTT yang mayoritas beragama Kristen, persoalan kemiskinan struktural berkaitan erat dengan cara gereja memahami hubungan antara iman, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Roma 13:1–7 sering ditafsirkan sebagai dasar teologis untuk tunduk kepada pemerintah, sehingga gereja cenderung bersikap pasif terhadap ketidakadilan. Namun, studi biblika kontemporer menunjukkan bahwa Paulus menempatkan pemerintah sebagai diakonos dan leitourgos, yakni pelayan publik yang legitimasinya bergantung pada kemampuannya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Dunn, 1988; Wright, 2005).

Meskipun studi tentang teologi politik Paulus dan kemiskinan struktural telah berkembang, belum banyak penelitian yang secara sistematis menghubungkan reinterpretasi Roma 13 dengan realitas kemiskinan di NTT. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada eksegesis Roma 13 tanpa kontekstualisasi sosial, atau membahas kemiskinan NTT tanpa landasan hermeneutika biblika. Kekosongan ini

membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner yang mempertemukan studi Perjanjian Baru, teori sosial, dan teologi publik kontekstual.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan sintesis antara hermeneutika gramatikal-historis Roma 13:1–7 dan analisis sosial-struktural kemiskinan NTT. Kebaruan penelitian ini terletak pada reinterpretasi Roma 13 dari paradigma subordinatif menuju profetis-transformatif, penerapannya sebagai kerangka evaluatif terhadap kinerja pemerintah, serta perumusan peran gereja sebagai komunitas profetis yang aktif dalam advokasi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan utama: bagaimana teologi politik Paulus dalam Roma 13:1–7 dapat menjadi landasan normatif-profetis untuk merespons kemiskinan struktural di Nusa Tenggara Timur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat interdisipliner. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks biblikal, literatur teologi politik, serta dokumen sosial-ekonomi yang menuntut interpretasi hermeneutis dan kontekstual secara mendalam (Creswell, 2014). Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam paradigma interpretatif-kritis yang tidak memposisikan Alkitab sebagai legitimasi ideologis kekuasaan, melainkan sebagai sumber refleksi teologis yang dibaca dalam dialog kritis dengan realitas sosial NTT, sejalan dengan hermeneutika Ricoeur (1981) dan tradisi engaged scholarship yang berpihak pada keadilan sosial (Forrester, 2004).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model hermeneutika kontekstual yang mengintegrasikan tiga horison penafsiran sebagaimana dikembangkan Thiselton (1980), yaitu dunia di balik teks (konteks historis Roma 13:1–7), dunia di dalam teks (analisis gramatikal dan teologis), serta dunia di hadapan teks (konteks sosial NTT). Pendekatan ini diperkuat oleh hermeneutika gramatikal-historis (Fee & Stuart, 2002), hermeneutika pembebasan (Gutiérrez, 1988; Horsley, 2000), dan hermeneutika teologi publik (Forrester, 2004) yang digunakan secara simultan untuk membangun sintesis teologis yang kontekstual dan transformatif terhadap realitas kemiskinan struktural.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks Roma 13:1–7 dalam *Novum Testamentum Graece* (NA28), data statistik kemiskinan NTT dari BPS (2020–2023), serta dokumen kebijakan pembangunan daerah seperti RPJMD dan laporan anggaran. Sumber sekunder mencakup literatur akademik, jurnal terindeks, dan tafsiran biblika yang relevan dengan teologi politik Paulus dan kemiskinan struktural. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, otoritas akademik, rentang waktu 1969–2023 (dengan prioritas 2014–2023), serta keterverifikasian sumber untuk memastikan validitas analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah reduksi dan kategorisasi data, yaitu proses pengelompokan literatur ke dalam empat klaster utama: (a) kemiskinan struktural NTT dan Indonesia Timur, (b) teologi politik Paulus dan studi Roma 13, (c) fungsi normatif negara dalam perspektif teologi publik, serta (d) peran profetis gereja dalam konteks sosial-politik. Tahap kedua adalah analisis hermeneutis Roma 13:1–7 dengan pendekatan gramatikal-historis yang berfokus pada istilah kunci *exousia*, *hupotassō*, *diakonos*, dan *leitourgos* berdasarkan analisis leksikal, konteks Perjanjian Baru, serta latar historis jemaat Roma pada masa Nero sekitar tahun 57 M (Fee & Stuart, 2002).

Tahap ketiga adalah analisis sosial-struktural terhadap kemiskinan NTT menggunakan model *social analysis* Holland dan Henriot (1983), yang mencakup proses *insertion*, *social analysis*, *theological reflection*, dan *pastoral response*. Analisis ini mengidentifikasi empat faktor utama kemiskinan struktural, yaitu kolonialisme, ketimpangan fiskal, marginalisasi geografis, dan patron-klienisme dengan dukungan teori *structural violence* (Galtung, 1969) dan *sistem-dunia* (Wallerstein, 1974). Tahap keempat adalah sintesis teologis melalui pendekatan teologi publik (Forrester, 2004) yang mengintegrasikan hasil analisis biblika dan sosial menjadi reinterpretasi Roma 13 dari paradigma subordinatif menuju profetis-transformatif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan teoritis yang menggabungkan teks biblika, tafsiran akademik, data statistik, serta analisis sosial-ekonomi untuk memperkuat kredibilitas dan ketajaman analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi dan Kategorisasi Data: Peta Masalah Hermeneutis dan Sosial

Berdasarkan proses reduksi dan kategorisasi data terhadap 87 sumber primer dan sekunder yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan empat klaster tematik utama yang membentuk kerangka awal penelitian ini. **Pertama**, dalam klaster kemiskinan struktural NTT dan Indonesia Timur, data statistik BPS (2020-2023) menunjukkan bahwa provinsi NTT konsisten berada di antara tiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, berkisar antara 19-21 persen, dengan tingkat stunting mencapai 37,8 persen (2022), jauh di atas rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia NTT (65,2 pada 2023) juga berada di bawah rata-rata nasional (72,8). Temuan ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan di NTT bukanlah fenomena residual atau individual, melainkan struktural-sistemik.

Kedua, dalam klaster teologi politik Paulus dan studi Roma 13, ditemukan adanya polarisasi interpretasi yang tajam. Di satu kutub, tradisi interpretasi "Lutheran-Konservatif" membaca *hupotassō* (ὑποτάσσω) sebagai kewajiban ketaatan tanpa syarat terhadap setiap pemerintah, dengan mengutamakan horison dunia di balik teks (kebutuhan stabilitas sosial di Roma abad pertama). Di kutub lain, hermeneutika pembebasan (misalnya Horsley, 2000; Elliott, 2008) membaca teks yang sama sebagai dokumen strategis perlawanan halus terhadap kekaisaran, dengan menekankan bahwa kata *exousia* (ἐξουσία) tidak secara otomatis merujuk pada negara Romawi yang korup. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi subordinatif absolut masih dominan dalam bahan-bahan pengajaran gereja arus utama di Indonesia, termasuk NTT, berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen sinode dan buku ajar Pendidikan Agama Kristen yang terbit sebelum 2015.

Ketiga, dalam klaster fungsi normatif negara dalam perspektif teologi publik, literatur menunjukkan adanya konsensus bahwa Roma 13:4 mendefinisikan negara sebagai *diakonos* (διάκονος) dan *leitourgos* (leitourgós) Allah, dua istilah yang secara etimologis berarti "pelayan" dan "pelayan publik yang melayani untuk kebaikan bersama". Negara tidak memiliki otoritas ontologis atas dirinya sendiri, melainkan otoritas fungsional yang bersyarat pada pelaksanaan keadilan.

Keempat, dalam klaster peran profetis gereja, ditemukan bahwa gereja di konteks kemiskinan struktural terjebak dalam dua ekstrem: aktivisme politik yang kehilangan dasar teologis, atau sebaliknya, eskapisme spiritual yang menolak keterlibatan publik. Keduanya gagal membangun teologi publik yang transformatif sebagaimana dikembangkan Forrester (2004).

Implikasi dari tahap reduksi ini adalah bahwa kemiskinan struktural NTT dan dominasi interpretasi subordinatif Roma 13 bukanlah dua isu terpisah, tetapi dua sisi dari krisis teologis-politik yang sama: kegagalan gereja membaca teks secara kritis dalam terang realitas ketidakadilan.

Analisis Hermeneutis Roma 13:1-7 (Gramatikal-Historis)

Pendekatan gramatikal-historis, analisis ini difokuskan pada empat kata kunci dalam teks Yunani NA28:

a. Exousia (ἐξουσία)

Kata *exousia* dalam konteks politik Yunani-Romawi memiliki spektrum makna yang luas: dari "kemampuan" hingga "kewenangan yang dilembagakan". Sumber-sumber non-Kristen kontemporer Paulus (misalnya tulisan Plutarch, Philo) menggunakan *exousia* untuk merujuk pada otoritas magistrat yang terbatas secara hukum (*imperium* dalam batasan hukum Romawi). Dalam horison dunia di dalam teks, Paulus tidak pernah menggunakan *exousia* untuk merujuk pada tirani atau pemerintahan yang melanggar hukum alam. Dalam Roma 13, *exousia* tidak berdiri sendiri, tetapi selalu didefinisikan oleh fungsinya: pemerintah adalah *exousia* hanya sejauh melaksanakan murka Allah atas kejahatan (ay. 4). Secara gramatikal, frasa *hypo theou tetagmenai eisin* (ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν) "telah ditetapkan oleh Allah" dengan menggunakan pasif teologis yang umum dalam Perjanjian Baru, tetapi penetapan ini tidak bersifat deterministik. Allah menetapkan prinsip otoritas yang melayani keadilan, bukan rezim tertentu secara absolut.

Penemuan penting: Dalam penggunaan *exousia* di seluruh sastra Perjanjian Baru (misalnya Yohanes 19:11; Wahyu 13:2), otoritas yang tidak menjalankan keadilan kehilangan legitimasi ontologisnya sebagai *exousia* dari Allah. Hal ini secara implisit memungkinkan pembedaan antara "pemerintah yang melayani kebaikan" (Roma 13:3-4) dan "pemerintah yang menjadi binatang" (Wahyu 13). Interpretasi subordinatif absolut yang menyamakan semua bentuk pemerintahan sebagai "kehendak Allah" tanpa syarat tidak dapat dipertahankan secara gramatikal.

b. Hupotassō (ὑποτάσσω)

Secara leksikal (BDAG, 2000), *hupotassō* adalah istilah teknis militer yang berarti "menempatkan diri di bawah struktur komando", tetapi tidak pernah berarti "menghilangkan agensi moral" dari pihak yang tunduk. Dalam korpus Paulus, *hupotassō* digunakan baik untuk hubungan warga-negara (Roma 13:1), maupun untuk hubungan dalam rumah tangga (Efesus 5:21-22), tetapi juga digunakan untuk subordinasi Kristus di bawah Bapa (1 Korintus 15:28) yang jelas merupakan ketaatan yang aktif, kritis, dan

sukarela bukan kepatuhan budak. Melalui analisis sintaksis, ditemukan bahwa Roma 13:1 menggunakan pasal ekshortatif (bukan deklaratif imperatif). Artinya, Paulus tidak sedang membuat pernyataan teologis absolut tentang sifat negara, melainkan memberikan nasihat pastoral yang kontekstual bagi jemaat Roma yang rentan dicurigai sebagai subversif. Dalam konteks historis akhir tahun 50-an M di bawah Nero (sebelum penganiayaan besar tahun 64 M), nasihat "tunduklah" lebih berfungsi sebagai strategi survival bagi minoritas Kristen, bukan sebagai doktrin teologi politik universal.

c. Diakonos (διάκονος) dan Leitourgós (leitourgós)

Kedua istilah ini merupakan penemuan paling tegas dalam analisis ini. Diakonos (Roma 13:4) di seluruh Perjanjian Baru merujuk pada pelayanan yang melayani kebutuhan orang lain, termasuk pelayanan Yesus sendiri (Markus 10:45). Paulus dengan sengaja memilih kata ini, bukan archōn (penguasa), untuk mendefinisikan fungsi negara. Leitourgós (Roma 13:6) dalam Septuaginta (LXX) secara reguler diterjemahkan sebagai "pelayan publik yang bekerja untuk kesejahteraan umum." Implikasi teologisnya sangat radikal: jika negara tidak berfungsi sebagai diakonos yang melayani keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang termiskin, maka negara telah mengingkari dirinya sendiri sebagai institusi yang ditetapkan Allah.

Analisis Sosial-Struktural Kemiskinan NTT

Mengikuti model Holland & Henriot (1983), analisis ini bergerak dalam tiga langkah:

a. Insertion (Menempatkan Diri dalam Realitas)

Sebagaimana telah dipaparkan dalam data statistik, penduduk NTT menghadapi akumulasi kemiskinan: tingkat pendidikan rendah, akses kesehatan terbatas, infrastruktur yang buruk, dan kerentanan pangan kronis. Namun angka-angka ini tidak bermakna tanpa memahami bahwa kemiskinan ini diciptakan dan direproduksi secara sistemik, bukan karena malas atau kebodohan orang NTT.

b. Social Analysis (Identifikasi Faktor Struktural)

Empat faktor struktural utama teridentifikasi dalam penelitian ini. **Pertama**, warisan kolonialisme yang membentuk fondasi ketimpangan historis di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada abad ke-19 serta birokratisasi kolonial Belanda telah menempatkan wilayah ini sebagai penyedia tenaga kerja murah dan sumber daya alam, tanpa disertai pembangunan institusi human capital yang memadai. Pola ekonomi ekstraktif tersebut kemudian berlanjut pasca-kemerdekaan tanpa perubahan struktural yang signifikan.

Kedua, ketimpangan fiskal dan distribusi sumber daya. Analisis terhadap data APBN dan APBD Provinsi NTT (2020–2023) menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) relatif lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa dan Sumatera, meskipun NTT memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih tinggi. Dalam perspektif *structural violence* Galtung (1969), kondisi ini merepresentasikan bentuk kekerasan sistemik yang terinstitusionalisasi, yang berdampak pada reproduksi kemiskinan melalui tingginya angka malagizi dan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Ketiga, marginalisasi geografis menjadi faktor penting kemiskinan struktural di NTT. Wilayah ini terdiri dari lebih 500 pulau dengan akses infrastruktur yang terbatas. Jalan darat di banyak desa sulit dilalui terutama pada musim hujan. Kebijakan pembangunan yang sentralistis sejak Orde Baru memperkuat ketergantungan daerah. Roma 13 sering ditafsirkan secara subordinatif tanpa kritik terhadap pemerintah. Tafsir ini dapat menutupi realitas ketidakadilan struktural di masyarakat. Malo et al. (2023) menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dalam praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa budaya dapat mereproduksi ketidakadilan sosial. Karena itu, Roma 13 perlu dibaca secara kritis dan kontekstual agar tidak melegitimasi ketidakadilan struktural.

Keempat, *patron-klienisme* sebagai sistem politik lokal yang berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial kemiskinan. Relasi patron–klien (dalam istilah lokal “anak buah–bapak”) tidak hanya beroperasi sebagai ikatan kultural, tetapi juga membentuk struktur ketergantungan yang membatasi akses masyarakat miskin untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya secara kritis. Kondisi ini diperkuat oleh interpretasi teologis subordinatif yang menekankan kepatuhan absolut terhadap pemerintah tanpa ruang kritik reflektif, termasuk melalui pembacaan Roma 13.

Dalam konteks ini, temuan Luji (2020) di Pulau Ndao memperkuat analisis kemiskinan struktural tersebut. Luji menunjukkan bahwa kemiskinan di masyarakat Ndao tidak bersifat individual, melainkan lahir dari perubahan sistem ekonomi lokal yang ditandai oleh masuknya teknologi penangkapan ikan modern, keterbatasan akses bahan baku, serta melemahnya sistem pewarisan budaya *tuku*. Transformasi ini secara bertahap mengikis keberlanjutan mata pencaharian tradisional dan mendorong masyarakat meninggalkan praktik ekonomi berbasis kearifan lokal yang sebelumnya menjadi penopang utama kehidupan sosial-ekonomi. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural di NTT dan dominasi interpretasi subordinatif terhadap Roma 13 tidak dapat dipahami sebagai dua persoalan terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan krisis teologis-politik. Keduanya merepresentasikan kegagalan dalam membaca teks dan realitas secara kritis dalam terang keadilan sosial, di mana struktur ekonomi, politik, dan tafsir teologis saling memperkuat reproduksi ketidakadilan.

c. Theological Reflection (Refleksi Teologis)

Refleksi ini akan diintegrasikan dalam sintesis teologi publik di bagian berikutnya, namun secara singkat: kemiskinan struktural di NTT bukanlah "hukum alam" atau "takdir Allah", melainkan hasil dari keputusan politik dan ekonomi yang dapat diubah. Injil dalam konteks ini harus berbicara sebagai pembebasan dari sistem patron-klien dan marginalisasi struktural, bukan sebagai legitimasi of the status quo.

Sintesis Teologi Publik: Dari Paradigma Subordinatif ke Profetis-Transformatif

Mengikuti Forrester (2004), teologi publik dipahami sebagai refleksi iman yang terlibat secara dialogis dalam perdebatan publik. Pada tahap ini, hasil analisis hermeneutis (Roma 13 sebagai kritik terhadap kekuasaan yang gagal melayani keadilan) dan hasil analisis sosial-struktural (empat faktor yang mereproduksi kemiskinan di NTT) disintesis ke dalam empat proposisi teologis-publik.

Proposisi 1: Negara Adalah Pelayan yang Bersyarat, Bukan Tuan yang Absolut

Dari analisis diakonos dan leitourgias di atas, ditegaskan bahwa negara di hadapan Allah tidak memiliki otoritas ontologis, melainkan otoritas fungsional yang bersyarat. Syaratnya adalah: negara harus "melakukan kebaikan" (Roma 13:4) dan "melayani untuk keperluanmu" (ay. 6). Ketika negara NTT (melalui kebijakan fiskal yang timpang dan infrastruktur yang tidak merata) gagal melakukan kebaikan bagi mereka yang termiskin, negara telah kehilangan klaimnya sebagai *exousia* yang patut ditaati secara moral. Ketaatan Kristen dalam konteks ini bukanlah kepatuhan buta, melainkan ketaatan kritis (*critical obedience*) yang taat pada Allah sebagai sumber otoritas final, siap mengingatkan negara ketika ia menyimpang dari panggilannya.

Proposisi 2: Gereja Dipanggil Menjadi "Suara Profetis" Bukan "Kapelan Negara"

Sintesis ini dengan tegas menolak model hubungan gereja-negara yang subordinatif-akomodatif, di mana gereja hanya memberikan legitimasi religius atas kebijakan pemerintah. Sebaliknya, mengikuti tradisi profetik Perjanjian Lama (misalnya Natan kepada Daud, Elia kepada Ahab) dan Yesus yang mengkritik kekuasaan Herodes dan Pilatus, gereja di NTT dipanggil untuk: (1) Mengingat pemerintah atas komitmennya pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, (2) Membongkar sistem patron-klien melalui pendidikan kritis warga dan pengembangan kepemimpinan warga yang mandiri, dan (3) Bersuara mengkritisi kebijakan anggaran yang tidak memihak orang miskin.

Proposisi 3: Pembacaan Ulang Roma 13 Sebagai Teks Perlawanan Halus terhadap Ketidakadilan Struktural

Berbeda dengan interpretasi tradisional yang mereduksi Roma 13 menjadi "teks ketaatan tanpa syarat", penelitian ini menawarkan tafsir bahwa dalam konteks kemiskinan struktural NTT, Roma 13 justru menjadi teks profetis. Logikanya adalah: jika Paulus di abad pertama berani mengatakan bahwa pemerintah yang kejam (Nero) pun tetap dinilai berdasarkan fungsi pelayanannya, maka terlebih lagi gereja di abad ke-21 dapat dan harus menilai pemerintah daerah dan pusat berdasarkan kriteria yang sama: "Apakah engkau melayani keadilan dan kehidupan, atau engkau melayani ketidakadilan?" Tafsir ini membebaskan gereja dari pasivitas politik dan mendorongnya ke dalam *engaged citizenship*.

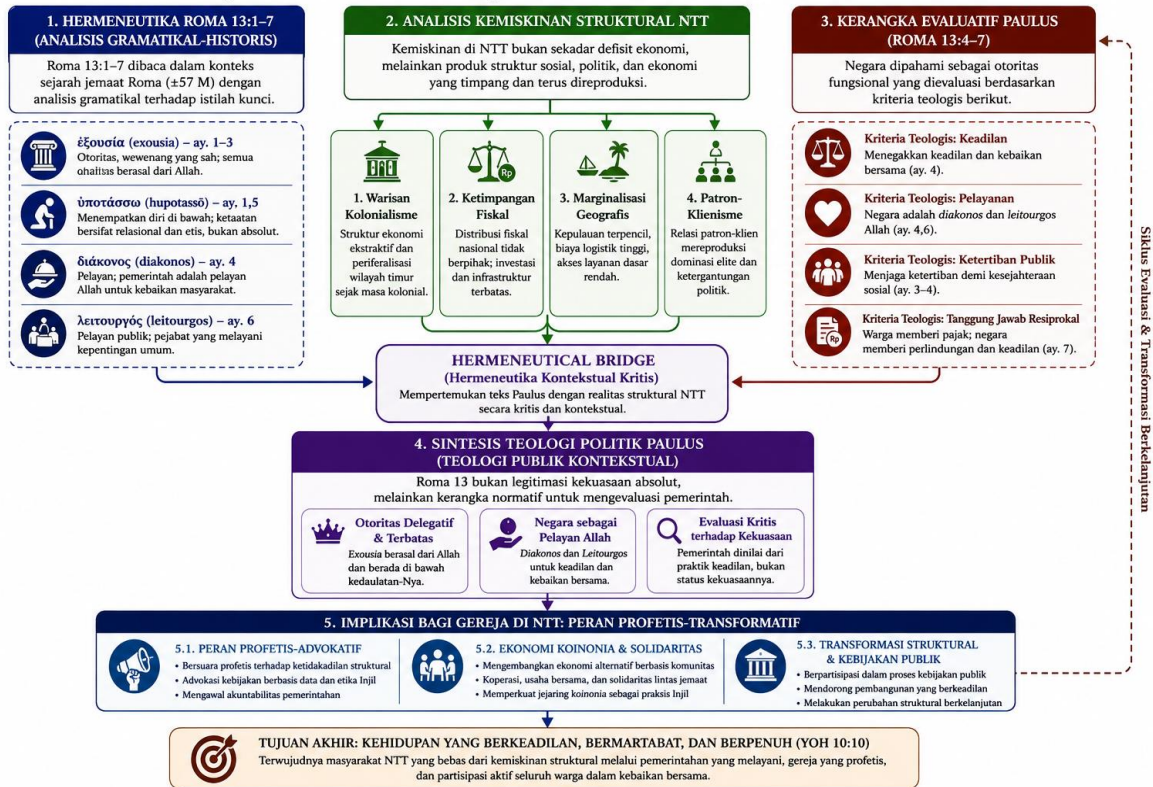
Proposisi 4: Implikasi Praksis bagi Gereja di NTT

Secara konkret, penelitian ini merekomendasikan tiga respons praksis yang relevan dengan konteks NTT: (1) Khotbah dan pengajaran yang transformatif: Pendeta di NTT perlu menghentikan pembacaan Roma 13 yang literal-subordinatif dan mulai mengajarkan teks ini dalam terang diakonos dan leitourgos, menghubungkannya langsung dengan realitas kemiskinan lokal, (2) kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM advokasi untuk memantau kebijakan publik (terutama APBD dan program perlindungan sosial) agar gereja tidak berkarya sendiri tetapi dalam aliansi strategis dan (3) pendidikan politik warga gereja berupa sekolah etika sosial dan forum warga, di mana Roma 13 didiskusikan secara kontekstual bersama data statistik kemiskinan setempat.

Ringkasan Temuan Utama

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang saling terkait, yakni temuan eksegetis, temuan sosial, dan temuan teologis-publik. Ketiga temuan ini secara bersama menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana reinterpretasi Roma 13:1–7 dapat membuka ruang bagi peran profetis gereja di tengah kemiskinan struktural NTT: (1) Temuan eksegetis: Roma 13:1-7 tidak mengajarkan ketaatan tanpa syarat kepada pemerintah. Kata kunci *exousia*, diakonos, dan leitourgos justru menetapkan prinsip fungsional bahwa negara otoritatif hanya ketika ia melayani keadilan. *Hupotassō* berarti ketaatan kritis, bukan subordinasi pasif, (2) Temuan sosial: Kemiskinan di NTT bersifat struktural (warisan kolonial, ketimpangan fiskal, marginalisasi geografis, sistem patron-klien), bukan individual-moral. Ini membutuhkan perubahan struktural, bukan sekadar amal, dan (3) Temuan teologis-publik: Interpretasi subordinatif yang dominan selama ini secara tidak sadar berfungsi sebagai pelayan ideologis status quo — membisukan gereja untuk mengkritik faktor-faktor struktural yang menindas. Penelitian ini menawarkan pembacaan profetis-transformatif yang membebaskan gereja untuk mengambil peran profetis.

Bagan 1. Model Sintesis Teologi Politik Paulus dan Kemiskinan Struktural NTT



KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi Roma 13:1-7 secara kontekstual guna membuka ruang bagi peran profetis gereja di tengah kemiskinan struktural NTT. Berdasarkan analisis hermeneutis gramatikal-historis terhadap teks Yunani NA28, ditemukan bahwa keempat kata kunci; *exousia* (otoritas fungsional), *hupotassō* (ketaatan kritis), *diakonos*, dan *leitourgos* (negara sebagai pelayan) tidak mendukung interpretasi subordinatif absolut yang selama ini dominan. Sebaliknya, Roma 13 mengajarkan bahwa negara hanya memiliki otoritas bersyarat sejauh ia melayani keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang termiskin.

Secara simultan, analisis sosial-struktural mengidentifikasi empat faktor yang mereproduksi kemiskinan di NTT; warisan kolonialisme, ketimpangan fiskal, marginalisasi geografis, dan sistem patron-klien yang semuanya merupakan hasil keputusan politik dan ekonomi, bukan takdir alamiah. Sintesis teologis-publik kemudian menghasilkan kesimpulan final bahwa gereja di NTT tidak lagi dapat mempertahankan pembacaan subordinatif yang membisukan suara profetisnya. Sebaliknya, gereja

dipanggil untuk menjadi suara profetis yang mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya sebagai diakonos Allah, membongkar sistem patron-klien, dan mendorong kebijakan yang memihak orang miskin. Penelitian ini terbuka untuk diuji secara empiris dan dikembangkan lebih lanjut melalui studi lapangan di NTT.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bersifat kepastakaan sehingga membuka ruang bagi penelitian empiris lanjutan di NTT. Kajian lapangan diperlukan untuk melihat pemahaman Roma 13 di kalangan jemaat dan pendeta. Penelitian juga perlu menilai dampaknya terhadap sikap sosial-politik mereka. Studi komparatif antar denominasi gereja di NTT tentang kemiskinan struktural juga penting dilakukan. Kajian berikutnya dapat memperluas teks Paulinis seperti Filipi 3:20, Efesus 6:10–18, dan 1 Timotius 2:1–4. Hal ini berguna untuk membangun teologi politik Paulinis yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu dikembangkan teologi lokal yang kontekstual di wilayah Timor, Flores, Sumba, dan Alor. Gereja juga perlu diteliti dalam peran advokasi kebijakan publik yang lebih efektif. Dengan demikian, teologi Paulus dapat menjadi dasar praksis transformatif bagi gereja di NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Brodjonegoro, B. (2006). *Desentralisasi sebagai kebijakan fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Brueggemann, W. (2001). *The prophetic imagination (2nd ed.)*. Fortress Press. .
- Chambers, R. (1983). *Rural development: . Putting the last: first*. Longman.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods . approaches (4th ed.)*.: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to . sociological methods (2nd ed.)*. : McGraw-Hill.
- Dunn, J. D. (1988). *Romans 9–16: . Word biblical commentary (Vol. 38B)*. : Word Books.
- Elliott, N. (1994). *Liberating Paul: The justice of God and the politics of the apostle*. . Orbis Books.
- Fee, G. D., & Stuart, D. (2002). *How to read the Bible for all its worth (3rd ed.)*. . Zondervan.
- Finger, R. H. (2007). *Of widows and meals: Communal meals in the book of Acts*. Eerdmans Publishing.
- Forrester, D. B. (2004). *Public theology and the future of Christian social thought*. International Journal of Public Theology, 1(1), 5–17.
- Freire, P. (n.d.). *Pedagogy of the oppressed*. . 1971: Herder and Herder.
- Gallup, J. L. (1998). *Geography and economic development*. *International Regional Science Review*, 22(2), 179–232. <https://doi.org/10.1177/016001799761012334>
- Galtung, J. (1969). *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Holland, J. &. (n.d.). *Holland, J., & Henriot, P. Social analysis: Linking faith and justice (Rev. ed.)*. .

- 1983: Orbis Books.
- Horsley, R. A. (2000). *Paul and politics: Ekklesia, Israel, imperium, interpretation*. . Trinity Press International.
- Käsemann, E. (1980). *Commentary on Romans (G. W. Bromiley, Trans.)*. . Eerdmans.
- Luji, D. S. (2020). *Eksistensi dan pewarisan budaya suku dalam masyarakat Pulau Ndao (Orang Ndao) Kabupaten Rote Ndao NTT*. . Paradigma: : Jurnal Kajian Budaya, 10(3), 289–310. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400>.
- Malo, M. L. (2023). *Praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya dalam perspektif perkawinan Kristen*. KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen, 4(2), 113–129. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i2.251>.
- Metzger, B. M. (n.d.). *The text of the New Testament: Its transmission, corruption, and restoration (4th ed.)*. . 2005: Oxford University Press.
- Scott, J. C. (1972). *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*. American Political : Science Review, 66(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/1959280> .
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Singgih, E. G. (2000). *Berteologi dalam konteks: Pemikiran mengenai kontekstualisasi teologi di Indonesia*. Kanisius & BPK Gunung Mulia.
- Soedjatmoko. (1995). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. Pilihan esai. : LP3ES.
- Statistik, B. P. (2023). Jakarta.
- Thiselton, A. C. (1980). *Thiselton, A. C. The two horizons: New Testament hermeneutics and philosophical description*. . Paternoster Press.
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. (Vol. 1): Academic Press.
- Witherington III, B. (2004). *Paul's letter to the Romans: A socio-rhetorical commentary*. . Eerdmans Publishing.
- Wright, N. T. (2005). *Paul: Fresh perspectives*. SPCK.